

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Organisasi dalam melaksanakan kegiatannya, memerlukan pengawasan, pengendalian agar setiap kegiatan yang dilakukan oleh organisasi tersebut dapat tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Sama halnya di lingkup pemerintahan dalam melaksanakan setiap kegiatan diperlukan fungsi pengawasan, evaluasi dan pengendalian sehingga setiap kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan kebijakan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan. Independensi auditor menjadi hal penting dalam menjalankan fungsi tersebut serta menjamin dari kecukupan dan efektivitas kerja yang dilaksanakan satuan kerja dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Auditor harus tetap mempertahankan independensinya pada situasi apapun, sehingga hasil pemeriksaan tidak berpihak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mautz dan Sharaf (1933) jika auditor tidak independen maka opininya tidak akan memberikan nilai tambah.

Auditor pemerintah terbagi menjadi 2 (dua) auditor eksternal dan auditor internal. Auditor eksternal yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan instansi pemerintah sebagai *auditee*. Auditor eksternal memiliki fungsi attestasi terhadap akuntabilitas pemerintah, memberikan pendapat mengenai kelayakan

pertanggungjawaban pemerintah (*attestation function*). BPK menyampaikan hasil laporan dan bertanggung jawab ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Sedangkan auditor internal adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Departemen/LPND dan Badan Pengawasan Daerah sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan instansi pemerintahan sebagai *auditee*, auditor internal memiliki fungsi dalam menilai kualitas (*quality assurance*) membantu pemerintah dalam menilai kegiatan penyelenggaraan manajemen pemerintahan yang efektif dan efisien memenuhi syarat ekonomis, memperbaiki efektivitas tata kelola organisasi, pengendalian, dan manajemen risiko (*the effectiveness of risk management, control, and governance processes*). Mengingat dibutuhkannya pengawasan lintas sektoral yang berperan aktif bersama dengan aparat penegak hukum dan pengendalian di lingkup pemerintahan salah satunya adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dalam hal BPKP adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dimana tidak dikoordinir menteri melainkan oleh Presiden.

Landasan tugas dan fungsi pokok BPKP diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 31 tahun 1983 diperbarui menjadi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 tahun 2008 pada Pasal 1 ayat (4) dikatakan bahwa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, kemudian diperjelas dalam Pasal 49 ayat (2) melakukan pengawasan intern

terhadap akuntabilitas keuangan negara terdiri dari kegiatan lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan Menteri Keuangan dan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden. Pada Pasal 59 bahwa BPKP memiliki tugas pembinaan penyelenggaraan Sistem Penyelenggaraan Intern Pemerintah (SPIP). BPKP juga memiliki 4 (empat) bidang penyelenggaraan, bidang pengawasan instansi pemerintah, bidang akuntabilitas pemerintah, bidang investasi dan bidang akuntan negara.

BPKP merupakan bagian dari APIP dan sebagai salah satu auditor internal pemerintah memiliki peranan penyelenggaraan kegiatan berdasarkan unsur-unsur Sistem Penyelenggaraan Intern Pemerintah (SPIP) meliputi pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian intern. Dengan adanya peran yang dimiliki auditor di BPKP, maka mereka sering dihadapkan pada suatu permasalahan seperti tuntutan untuk tetap menjaga sikap independen dan profesional sebagai auditor, guna mencapai tujuan dan harapan yang telah ditetapkan sebelumnya. Independensi auditor juga merupakan salah satu wujud konsistensi terhadap komitmen independensi. Tidak bisa dipungkiri, bahwa auditor pasti juga pernah mengalami ambiguitas, konflik dan tekanan yang mungkin dapat muncul saat mereka diberi penugasan untuk itu auditor perlu memiliki kompetensi yang kredibel. Bila keadaan tersebut tidak dapat teratasi, maka kinerja auditor menjadi tidak maksimal, pada akhirnya membuat mereka tidak dapat mewujudkan komitmen independensi auditor internal.

Komitmen independensi auditor internal menjadi hal yang penting bagi organisasi dalam menjaga kelangsungan hidup organisasi. Tingkat keberhasilan kinerja auditor pada setiap pekerjaan, ditentukan juga oleh komitmen. Komitmen merupakan wujud keterikatan seseorang terhadap suatu hal. Komitmen menjadi dorongan seseorang untuk bekerja lebih baik lagi. Dalam membangun independensi auditor internal bukanlah hal yang mudah, banyak hal-hal yang dipertimbangkan dan perlu adanya evaluasi tiap pelaksanaannya, dan pada kenyataannya bila tidak ada komitmen terhadap pribadi auditor, maka akan sulit mempertahankan independensi pada profesinya sebagai auditor. Sehingga seringkali timbul adanya kendala-kendala yang berasal dari karyawan pada organisasi tersebut, seperti rendahnya komitmen independensi mereka saat diberi penugasan, tanggung jawab atas suatu permasalahan yang dijumpai, dan ketika penyimpangan ditemukan.

Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia seksi 1100 alinea 03 dan 05 dijelaskan tentang penugasan audit intern, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan kegiatan audit internal harus tetap independen dan objektif. Independensi dan objektivitas APIP diperlukan agar kredibilitas hasil audit terus meningkat. Independensi yang berarti kebebasan dari keadaan yang mengancam kemampuan aktivitas audit untuk melaksanakan tanggung jawab secara objektif. Independensi dibutuhkan saat seorang auditor melaksanakan tanggung jawab aktivitas audit yang efektif dan efisien. Ancaman akan

independensi seorang auditor harus dapat dikelola pada tingkat individu auditor, penugasan audit intern, fungsional, dan organisasi.

Menurut Roufiq, (2010) langkah awal membangun independensi auditor internal adalah komitmen. Komitmen yang diberikan auditor internal terhadap independensi dituangkan dalam kode etik internal audit dilaksanakan sesuai dengan konsekuensi yang berlaku dan tidak berpihak pada kepentingan suatu aktivitas atau objek yang diaudit, jika auditor internal berkaitan dengan objek yang diaudit maka secara fakta auditor tidak independen (Subiyanto, 2013). Seorang auditor internal selain memiliki sikap profesionalisme juga harus memiliki sikap komitmen independensi berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab di perusahaan.

Fenomena umum yang terjadi berkaitan dengan auditor internal di lingkungan pemerintah, yaitu masih rendahnya kinerja pengawasan dan pengendalian internal di lingkungan pemerintah. Presiden Joko Widodo mengutarakan kekecewaannya pada saat membuka Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah di BPKP. Hal ini dikarenakan kinerja tim para pengawasan yang dapat dikatakan masih jauh dari memuaskan. Presiden Joko Widodo juga mendapatkan laporan dari Kepala BPKP Ardan Adiperdana mengenai internal audit mereka, dimana hasilnya berada di level terburuk Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) tercatat 85%. Pada level selanjutnya masih cukup banyak tercatat sekitar 14%, sedangkan pada level 3 tercatat hanya ada 1%. Data tersebut mengungkapkan bahwa para pengawas internal di lingkungan

kementerian maupun di lingkungan pemerintah pusat dan daerah, belum bisa sepenuhnya memberikan jaminan mengenai kehadiran tata kelola pemerintahan yang baik. Hal Ini juga termasuk dalam soal pencegahan tindak korupsi. Presiden Joko Widodo memberikan target kurun waktu 5 (lima) tahun untuk mengubah keadaan atau kondisi tersebut. (Detiknews,2015)

Fenomena umum lainnya yang juga berkaitan dengan auditor internal adalah kasus yang terjadi pada PT. Pertamina Energi Trading Ltd (PETRAL) ketidakmampuan audit internal dalam mendeteksi temuan-temuan yang mengakibatkan biaya tinggi (*high cost*) pada perusahaan tersebut, yang diakibatkan pembelian BBM dan minyak sebagai indikasi utama penyebab terjadinya ketidak optimalan pihak manajemen dalam mengelola setiap kegiatan perusahaan. Hal ini juga diperburuk dengan auditor internal pada PT. PETRAL yang mengalami kegagalan dalam memeriksa kerugian negara pada periode kegiatan 2012-2015.

Teori peran menyatakan saat perilaku yang diharapkan individu tidak konsisten mereka dapat mengalami stress, depresi, merasa tidak puas, dan kinerja kurang efektif, daripada jika harapan tidak mengandung konflik. Dapat dikatakan *role conflict* dapat memberi pengaruh negatif tentang cara berpikir seseorang yang secara tidak langsung dapat menurunkan tingkat komitmen independensi. Lingkungan kerja atau tempat seseorang berorganisasi dapat mempengaruhi seseorang dalam menjalankan tugas yang diemban, dengan adanya lingkungan tepat dan sesuai membantu mengurangi jumlah konflik

maupun ketidaksesuaian antara lingkungan dengan pekerjaan. Berarti dalam berperilaku dan bertindak seseorang terdapat nilai-nilai dari lingkungan tempat dimana seseorang itu bekerja. Lingkungan yang mendukung dapat menambah produktivitas seseorang saat bekerja, sehingga mengurangi tingkat yang tidak diharapkan dalam pekerjaan dan meningkatkan kepuasan kerja. Kepuasan yang telah dicapai, tentu meningkatkan komitmen independensi tersebut.

Adapun *role ambiguity* mengurangi tingkat kepastian informasi yang didapat dalam pemeriksaan apakah telah objektif dan relevan. *Role ambiguity* dapat membuat auditor mengalami tekanan dan penurunan kepuasan kerja. Adanya *role ambiguity* pada auditor juga dapat mengurangi kemampuan mereka untuk tetap bersikap independen. Sawyer (2003) menjelaskan adanya *role ambiguity* dalam lingkungan auditor internal disaat melakukan investigasi, auditor belum mengetahui jelas dan benar tentang kondisi operasional, kompleks, luas, dan individu objek pemeriksaan ketika berbicara dalam bahasa atau istilah asing bagi pemahaman auditor.

Role Conflict (konflik peran) dalam lingkungan auditor internal dapat muncul dari pertentangan peran audit dan peran jasa konsultasi. Dalam peran audit, auditor harus menjaga independensi dengan tidak mendasarkan auditnya pada suatu objek pemeriksaan. Namun saat peran konsultasi, auditor internal harus bekerja sama dan membantu objek pemeriksaan audit. Menurut Robbins (2015) *role conflict* (konflik peran) adalah keadaan individu dihadapkan pada

harapan peran yang bertentangan atau berlawanan. Konflik terjadi disaat seorang individu patuh pada persyaratan peran tersebut dan kesulitan dalam persyaratan peran lainnya. Kesadaran moral serta keyakinan individu untuk bersikap profesional memegang peranan penting dalam setiap keputusan auditor internal.

Dalam kode etik APIP disebutkan bahwa auditor harus memiliki kompetensi, yakni: pengetahuan, keahlian, pengalaman dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas (PER/05/M.PAN/03/2008). Kompetensi auditor memiliki pengetahuan dan pengalaman cukup dan jelas dapat melaksanakan audit secara objektif, cermat dan juga seksama disebut dengan kompetensi auditor (Agusti, R dan Pertiwi, N. P 2013), Kompetensi merupakan keahlian, pengalaman, pengetahuan serta keterampilan yang dibutuhkan auditor dalam menjalankan tugas auditnya secara cermat, objektif, dan juga seksama (Nugrahini,2015).

Tekanan Klien dalam lingkungan auditor internal menjadi salah satu resiko dari profesi auditor. Dalam hal ini kesadaran moral serta keyakinan individu untuk bersikap profesional memegang peranan penting dalam setiap keputusan auditor dalam menghadapi tekanan klien. Tekanan klien yang menimpa auditor dapat menyebabkan hilangnya independensi yang dimiliki auditor (Triana, 2010). Menurut Jamilah (2007) auditor mengalami dilema etika antara pilihan dan nilai-nilai bertentangan, sehingga klien bisa

mempengaruhi proses pemeriksaan yang dilakukan auditor untuk melanggar standar etika profesi.

Role Ambiguity (ambiguitas peran) berpengaruh negatif terhadap komitmen independensi auditor internal dihasilkan oleh penelitian Hutami, G dan Anis, C (2010), Angga Prasetyo Marsono (2011), Novitasari, Purnamasari, Gunawan (2015), Saraswati, Atmadja, dan Darmawan (2014).

Role Conflict (konflik peran) berpengaruh negatif terhadap komitmen independensi auditor internal dihasilkan oleh penelitian Hutami, G dan Anis, C (2010), Angga Prasetyo Marsono (2011), Novitasari, Purnamasari, Gunawan (2015), Saraswati, Atmadja, dan Darmawan (2014). Kompetensi berpengaruh positif dihasilkan oleh penelitian Iswari (2013), Soraya (2014), dan Praningta, F.T. (2017). Tekanan klien berpengaruh negatif terhadap komitmen independensi dihasilkan oleh penelitian Elfarini (2007), Triana (2010) dan Saraswati, Atmadja, dan Darmawan (2014).

Penelitian yang ada di Unika Soegijapranata yang dilakukan oleh Praningta, F.T. (2017) menyatakan bahwa ambiguitas peran dan konflik peran berpengaruh negatif terhadap komitmen independensi. Sehingga ambiguitas peran dan konflik peran tinggi maupun rendah tidak berpengaruh terhadap komitmen independensi auditor internal.

Penelitian ini menjadi hal yang penting mengingat fenomena yang menimpa auditor mengindikasikan rendahnya komitmen independensi auditor dan independensi bergantung pada sikap pribadi dan komitmen pada internal

auditor dalam melaksanakan tugas dan penilaian pada tempat dia bekerja, sehingga penting mengetahui komitmen independensi pada auditor internal, apakah peran auditor internal, kompetensi dan tekanan klien dapat mempengaruhi independensi auditor internal. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu dengan menggabungkan dari penelitian yang telah dilakukan Hutami, G dan Anis, C (2011) mengambil variabel *role ambiguity* (ambiguitas peran) dan *role conflict* (konflik peran), pada penelitian Praningta, F.T. (2017) mengambil variabel kompetensi, serta penelitian Triana (2010) dan Saraswati, Atmadja, dan Darmawan (2014) mengambil variabel tekanan klien dengan ruang lingkup kerja yang berbeda yaitu auditor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH *ROLE AMBIGUITY*, *ROLE CONFLICT*, KOMPETENSI DAN TEKANAN KLIEN TERHADAP KOMITMEN INDEPENDENSI AUDITOR PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PROVINSI JAWA TENGAH”**.

1.2 Perumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas maka didapat perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah *role ambiguity* (ambiguitas peran) berpengaruh negatif terhadap komitmen independensi auditor BPKP?
2. Apakah *role conflict* (konflik peran) berpengaruh negatif terhadap komitmen independensi auditor BPKP?
3. Apakah kompetensi berpengaruh positif terhadap komitmen independensi auditor BPKP?
4. Apakah tekanan klien berpengaruh negatif terhadap komitmen independensi auditor BPKP?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan tentang latar belakang yang ada, penelitian ini bertujuan:

1. Menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh *role ambiguity* (ambiguitas peran) terhadap komitmen independensi auditor BPKP.
2. Menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh *role conflict* (konflik peran) terhadap komitmen independensi auditor BPKP.
3. Menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh kompetensi terhadap komitmen independensi auditor BPKP.

4. Menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh tekanan klien terhadap komitmen independensi auditor BPKP.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi teoritis dan kontribusi praktis.

1. Kontribusi teoritis,

Pada penelitian ini yaitu sebagai tambahan referensi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, permasalahan, dan topik serupa, mengenai bagaimana pengaruh *role ambiguity* (ambiguitas peran), *role conflict* (konflik peran), kompetensi dan tekanan klien terhadap komitmen independensi auditor.

2. Kontribusi Praktis,

2.1 Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai permasalahan yang berkaitan dengan profesi auditor internal, secara khusus mengenai komitmen independensi auditor.

2.2 Bagi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan gambaran atau pemahaman, agar berhati-hati dalam menjaga komitmen independensi seorang auditor internal, dimana komitmen independensi ini memiliki asimetri informasi yang

tinggi. Selain itu, BPKP dapat meningkatkan kualitas pengawasan terhadap setiap komitmen yang disajikan auditor internal agar tidak terjadi kendala atau hambatan, demi tercapai tujuan utama BPKP.

2.3 Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kontribusi literatur akuntansi tentang pengaruh *role ambiguity*, *role conflict*, kompetensi dan tekanan klien terhadap komitmen independensi auditor.

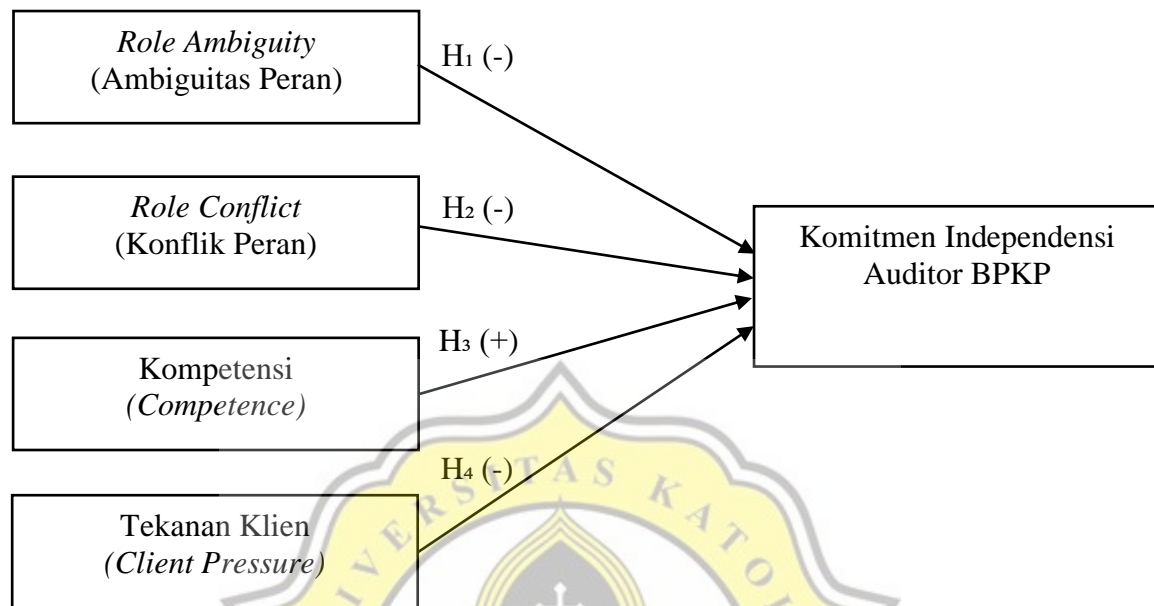
2.4 Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan atau sarana pertimbangan dan pemikiran dalam penelitian selanjutnya, atau penelitian lebih lanjut dengan topik serupa berkaitan dengan pengaruh *role ambiguity*, *role conflict*, kompetensi dan tekanan klien terhadap komitmen independensi auditor.

2.5 Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan atau sarana wawasan mengenai pengaruh *role ambiguity*, *role conflict*, kompetensi dan tekanan klien terhadap komitmen independensi auditor.

1.4 Kerangka Pikir Penelitian



Bagan 1.1 Kerangka Pikir Penelitian

Penelitian ini menganalisis mengenai pengaruh *role ambiguity* (ambiguitas peran), *role conflict* (konflik peran), kompetensi dan tekanan klien terhadap komitmen independensi auditor BPKP. Salah satu profesi yang diberdayakan dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pencegahan yang bersifat *represif* dan *preventif* dan tata kelola adalah auditor. BPKP sebagai salah satu lembaga auditor dalam ruang lingkup internal pemerintahan memiliki peranan penting sebagai peran konsultasi dan memberikan keyakinan yang objektif dan memadai, dikelola secara independen demi meningkatkan kegiatan operasional atau tujuan utama pemerintah dalam

mencapai *Good Governance* dan *Clean Governance*, dan menegaskan bahwa pada hakikatnya efektivitas pencegahan ada pada internal pemerintah.

Komitmen independensi merupakan dasar utama kepercayaan klien, perusahaan dan masyarakat pada profesi seorang auditor dan menilai seberapa besar mutu atau hasil atas jasa audit yang telah dikerjakannya. Komitmen independensi sendiri merupakan suatu sikap yang independen, profesional, tegas, obyektif. Seorang auditor harus melaksanakan dan merencanakan segala program audit secara bertanggung jawab untuk mencapai tujuan audit yang diharapkan. Dengan kehadiran profesi auditor juga, diharapkan mampu memenuhi kebutuhan setiap pihak yang menggunakan jasa auditnya, karena mereka percaya bahwa auditor yang telah memiliki komitmen independensi dapat menganalisis, mengkaji, atau menilai tingkat dari kewajaran informasi keuangan yang disajikan pihak manajemen.

Pola dan alur dari penelitian ini, peneliti menentukan terlebih dahulu variabel *role ambiguity* (H_1), *role conflict* (H_2), kompetensi (H_3) dan tekanan klien (H_4) sebagai variabel independen yang tampaknya memiliki pengaruh terhadap komitmen independensi auditor sebagai variabel dependen. Penentuan dan pemilihan variabel ini didasarkan pada penelitian-penelitian sebelumnya, kemudian dari variabel independen yang telah dipilih, untuk dicari apakah tiap-tiap variabel independen tersebut memiliki pengaruh terhadap komitmen independensi auditor BPKP dengan menggunakan metode uji analisis regresi berganda dan uji asumsi klasik.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari 5 bagian dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pikir penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Dalam bab ini diuraikan mengenai teori pendukung untuk memperkuat penelitian, serta penelitian yang dilakukan terdahulu yang dijadikan acuan, yang menyajikan hipotesis berdasarkan logika pikir.

BAB III: METODE PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV: HASIL DAN ANALISIS

Dalam bab ini diuraikan mengenai deskripsi objek penelitian, analisis data statistik, dan interpretasi hasil untuk menjawab permasalahan yang ada di penelitian ini.

BAB V: PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan mengenai kesimpulan yang didapat dari penelitian keterbatasan penulisan serta saran – saran untuk penelitian selanjutnya.

